

**RELASI PARTAI POLITIK DAN KONSTITUEN  
DI KOTA BANDUNG DAN KABUPATEN SUMEDANG**

**Caroline Paskarina, Neneng Yani Yuningsih, Siti Witianti**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Email: cpaskarina@yahoo.com

**ABSTRAK.** Penelitian ini difokuskan untuk mencari gambaran mengenai relasi partai politik dengan konstituen dalam mencari dukungan massa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dioperasionalkan melalui metode survei pakar, di mana kuesioner disebarakan kepada responden yang dipandang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang partai politik, kampanye, dan pemilihan umum maupun lokal yang berlangsung di lokasi penelitian, serta memiliki pengetahuan tentang konteks politik lokal di lokasi penelitian. Responden terdiri dari elit partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa lokal di kedua lokasi penelitian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi partai politik di tingkat lokal diintervensi oleh pengurus pusat, mekanisme pertukaran masih bersifat transaksional dengan faktor uang yang paling peran, partai dan kandidat tidak terlalu melakukan pengawasan dengan ketat, partai politik saat ini lebih bersifat non ideologis, dan partai politik belum menggunakan strategi yang efektif dalam penggalangan dukungan. Agar relasi partai politik dan konstituen menjadi lebih demokratis, maka kami menyarankan pimpinan partai pusat memberikan otonomi kepada partai di tingkat lokal untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara memperkuat organisasi partai di tingkat lokal baik sumber daya manusia ataupun sumber keuangan partai.

**Kata kunci:** partai politik, konstituen

**RELATIONSHIP OF POLITICAL PARTIES AND CONSTITUENTS  
IN KOTA BANDUNG AND KABUPATEN SUMEDANG**

**ABSTRACT.** *This research focuses on describing the relationships of political parties with constituents in seeking popular support. This research was conducted by using a quantitative approach which operated through an expert survey method, in which the questionnaires distributed to respondents who viewed a broad and deep knowledge about political parties, campaigns, and general and local elections that took place at the study locations, and have knowledge about the political context locally at the locations. Respondents consisted of elite political parties, academics, community leaders, and local mass media in the two study sites. The results of data analysis showed that the management of political party organization at the local level of intervention by the central board, is still a transactional exchange mechanism with the*

*money factor that most roles, parties and candidates are not too tight supervision, political parties are now more non-ideological, and the party politics have not used an effective strategy in raising support. In order for political parties and constituency relations become more democratic, then we suggest that the central party leadership to give autonomy to the parties at the local level to make their own decisions by strengthening the party organization at the local level either human resources or financial resources of the party.*

**Keywords:** *political parties, constituents*

## **PENDAHULUAN**

Dalam banyak literatur yang membahas tentang pelembagaan atau konsolidasi demokrasi, partai politik ditempatkan sebagai salahsatu instrumen strategis yang menentukan keberhasilan bekerjanya demokrasi sebagai sebuah sistem. Partai politik berperan penting dalam rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan politik sehingga menjadi 'pintu masuk' utama untuk menumbuhkan praktik-praktik demokratis dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Meskipun berperan penting, tapi keberadaan partai politik di negara-negara berkembang justru lebih banyak dipandang negatif. Pandangan negatif ini muncul karena partai politik, seperti di Indonesia, lebih banyak muncul ketika menjelang pemilihan umum berlangsung sementara pada masa-masa di luar itu, relatif tidak berfungsi efektif. Demikian pula dari sisi sumber daya manusia, partai politik di Indonesia banyak memiliki kader yang dipandang kurang memiliki kapasitas untuk melakukan fungsi-fungsi politik secara optimal.

Berbeda dengan perkembangan partai politik di negara-negara industri maju yang bertumbuh melalui proses panjang sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitasnya seoptimal mungkin, partai politik di negara-negara berkembang lahir dan tumbuh melalui proses yang berbeda. Sejarah partai politik di Indonesia bermula dari partai-partai yang lahir di kalangan elit terdidik dengan semangat kebangsaan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada periode ini, ideologi masih sangat berperan sebagai identitas partai, termasuk dalam pola pengambilan keputusan. Memasuki periode Orde Baru, partai politik mengalami penurunan keberfungsian yang sangat signifikan.

Ketika reformasi berlangsung, kemunculan banyak partai politik baru tidak berbanding lurus dengan kualitas organisasi maupun sumber daya manusianya. Di level lokal, demokratisasi ditandai dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, di mana partai politik juga berperan penting sebagai 'kendaraan politik' untuk mempromosikan para figur yang berpotensi untuk menjadi pemimpin politik tertinggi di daerah. Peran ini kenyataannya lebih banyak dilaksanakan dengan pertimbangan pragmatis, sebagaimana tampak dari kecenderungan partai politik untuk mengajukan

calon dari kalangan selebriti atau tokoh-tokoh publik terkenal lainnya yang bukan merupakan kader partai yang bersangkutan. Hanya beberapa partai yang mampu mempertahankan posisi kekuasaannya, yang umumnya merupakan partai-partai besar, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sosial, dan Partai Amanat Nasional. Kelima partai ini juga mampu mempertahankan posisinya dalam jabatan-jabatan politik di daerah.

Studi ini berfokus pada relasi antara partai politik dengan konstituennya karena hal ini merupakan esensi dari keberadaan sebuah partai politik. Konteks politik di Indonesia memiliki karakter khusus, yakni pola patronase atau patron-klien yang melandasi relasi kekuasaan di antara para aktor, termasuk antara partai politik dengan konstituennya. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus dilakukan untuk membuktikan sejauhmana karakter patronase ini masih ada setelah demokratisasi di tingkat lokal berlangsung. Karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji sejauhmana relasi antara partai politik dan konstituen mengalami perubahan di masa sekarang, seperti apa karakter relasi kekuasaan yang mendominasi, dan bagaimana karakter tersebut mewarnai posisi partai dalam pengambilan kebijakan.

Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang dipilih sebagai lokasi penelitian karena keduanya memiliki karakter khusus. Keduanya menjadi lokasi dari banyak perguruan tinggi ternama di Jawa Barat, sehingga diasumsikan tumbuh rasionalitas dalam berpolitik di kalangan masyarakat. Keduanya dipimpin oleh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik yang berbeda, sehingga menarik untuk diteliti apakah konteks politik ini akan mewarnai karakter kebijakan yang dibuat. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada belum banyaknya penelitian sejenis yang berupaya mengkaji bagaimana partai politik di era desentralisasi mengelola relasi politiknya dengan para konstituen. Apakah partai politik mengembangkan kelembagaan organisasi dan mekanisme yang dapat digunakan untuk menjaring aspirasi dan memonitor loyalitas konstituennya. Hal apa yang melatarbelakangi sikap politik partai terhadap sebuah isu atau kebijakan serta strategi apa yang digunakan partai untuk saling berkompetisi dalam memobilisasi dukungan konstituen. Pada dasarnya, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana partai politik menempatkan konstituennya di luar masa-masa pemilihan nasional atau lokal, sehingga melalui kajian tentang hal tersebut, akuntabilitas dari proses demokrasi dapat ditingkatkan. Rumusan masalah utama yang diteliti adalah bagaimana relasi antara partai politik dan konstituennya yang berlangsung di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Secara rinci, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijabarkan dari rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana organisasi partai politik dikelola di level lokal?
2. Bagaimana mekanisme pertukaran yang berlangsung antara partai politik dengan konstituen?

**Relasi Partai Politik dan Konstituen di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang  
(Caroline Paskarina, Neneng Yani Yuningsih, Siti Witianti)**

3. Bagaimana proses monitoring yang dilakukan partai politik terhadap aspirasi konstituennya?
4. Bagaimana posisi kebijakan yang dimiliki partai politik?
5. Bagaimana strategi kompetisi yang digunakan partai politik untuk memobilisasi dukungan konstituen?

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dioperasionalkan melalui metode survei karena instrumen pengumpulan data utamanya adalah kuesioner (Singarimbun dan Effendi, 1989). Selain kuesioner, juga dilakukan pengumpulan data sekunder berupa literatur dan dokumen yang terkait dengan lokasi penelitian. Pengumpulan data sekunder ini dimaksudkan sebagai pelengkap dalam menganalisis hasil kuesioner.

**Tabel 1.** Kategori Responden

No	Kategori	Jumlah Responden Orang
1.	<p>Elit partai politik:</p> <p>A. Kota Bandung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai Demokrat</li> <li>- Partai Golkar</li> <li>- PDI-P</li> <li>- PKS</li> <li>- Partai Gerindra</li> </ul> <p>B. Kabupaten Sumedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDI-P</li> <li>- Partai Golkar</li> <li>- Partai Demokrat</li> <li>- PPP</li> <li>- PKS</li> </ul>	<p>Masing-masing 1 orang dari 5 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD. Responden adalah anggota DPRD</p>
2.	<p>Akademisi dari perguruan tinggi setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. FISIP Unpad</li> <li>b. Fakultas Hukum Unpad</li> <li>c. FISIP Universitas Parahyangan</li> <li>d. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan</li> <li>e. FISIP Universitas Pasundan</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
3.	Tokoh Masyarakat	1
4.	Media Massa Lokal	1

Survei yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei pakar (*expert survey*) (Kitschelt dkk., 2007), di mana para responden yang diminta untuk mengisi kuesioner adalah para individu yang dipandang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang partai politik, kampanye, dan pemilihan umum maupun lokal yang berlangsung di lokasi penelitian, serta memiliki pengetahuan tentang konteks politik lokal di lokasi penelitian. Penentuan responden dilakukan secara purposif di mana responden mewakili kategori pada tabel 1.

### **Kategori Responden**

Data dari kuesioner diolah dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dengan mencari modus berdasarkan distribusi frekuensi untuk jawaban tiap item pertanyaan. Selanjutnya, data primer dan sekunder dianalisis dengan teknik interpretasi untuk memperoleh gambaran tentang relasi politik antara partai dan konstituen di kedua lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Organisasi Partai Politik Kota Bandung**

Partai-partai di Kota Bandung maupun di Kabupaten Sumedang yang kami teliti telah memiliki kantor cabang yang permanen hampir di seluruh kecamatan, kecuali beberapa partai baru seperti Gerindra, kantor-kantor cabang mereka tidak sebanyak partai lain yang sudah lama dan sudah mapan.

Partai-partai tersebut melakukan kegiatan sosial dalam rangka mencari dukungan massa, seringkali kegiatan tersebut dipandang negatif karena tidak ada bedanya dengan *praktik-praktik money politics*. Komunikasi politik antara partai politik dengan konstituen dijaga melalui perantara yang ada di daerah-daerah, sehingga mereka dapat terus memantau pendukung-pendukung mereka.

Partai-partai di Kota Bandung maupun di Kabupaten Sumedang pada dasarnya membolehkan anggotanya berpartisipasi memilih calon anggota legislatif, akan tetapi keterlibatan itu masih formalitas saja, karena walau bagaimanapun pada akhirnya, keputusan ditentukan oleh pimpinan pusat partai. Penentuan calon anggota legislatif dilakukan dengan mekanisme tawar menawar dan didalamnya melibatkan permainan uang. Selain pemilihan calon anggota legislatif dalam penentuan strategi pemilihan baik di Kabupaten Sumedang maupun di Kota Bandung ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, sehingga seringkali di daerah dimunculkan figur-figur nasional untuk menarik dukungan massa. Beberapa partai politik memiliki faksi-faksi di dalam tubuh partainya sehingga seringkali kompetisi kandidat tidak hanya terjadi dengan kandidat dari partai lain, akan tetapi juga bersaing dengan kandidat dari partai sendiri.

**Relasi Partai Politik dan Konstituen di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang  
(Caroline Paskarina, Neneng Yani Yuningsih, Siti Witianti)**

---

Organisasi partai politik dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan dukungan sumber pendanaan yang cukup. Akan tetapi ternyata menurut responden bahwa partai-partai selalu kekurangan dana. Kekurangan tersebut tidak diatasi oleh iuran anggota, akan tetapi kecenderungan saat ini adalah menjadikan anggota legislatif menjadi mesin uang dengan cara merampok APBD.

Pada dasarnya sumber pendapatan partai yang sah adalah dari iuran anggota, dan pendapatan lain yang sah seperti sumbangan publik yang batasan maksimalnya sudah diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum. Akan tetapi faktor kekurangan dana yang menyebabkan kurangnya kepatuhan partai atau kandidat terhadap aturan menjadi diabaikan.

Kondisi demikian menyebabkan para responden kurang percaya kepada partai politik dalam pengelolaan partainya di tingkat lokal, karena partai di tingkat lokal tidak memiliki kebebasan dalam melakukan pengelolaan tersebut.

### **Mekanisme Pertukaran Antara Partai Politik dengan Konstituen**

Partai politik sangat membutuhkan konstituen untuk memenangkan pemilihan umum, selain itu partai politik juga memerlukan konstituennya dalam menjaga keberlangsungan hidup partai politik. Sehingga partai politik selalu memelihara hubungan untuk jangka waktu yang panjang dengan konstituen. Untuk itu, partai politik selalu melakukan upaya untuk membuat mekanisme, strategi, dan pola pertukaran yang dapat menjaga kesetiaan konstituen partai bersangkutan.

Mekanisme pertukaran partai politik dengan konstituennya akan dilihat dari upaya partai dalam menarik simpati masa dari melalui beberapa cara, yaitu penyediaan kebutuhan konstituen, memberikan kemudahan-kemudahan kepada konstituen, memberikan kesempatan kerja bagi konstituen, dengan cara menawarkan akses khusus untuk mengadakan kontrak dengan pemerintah atau pemberian peluang dalam pengadaan barang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan mekanisme pertukaran antara konstituen dengan partai kebanyakan menggunakan pola transaksional, partai politik akan memberikan imbalan kepada konstituen berupa materi atau kemudahan-kemudahan lainnya jika mereka berjanji untuk memilih partai tersebut. Kemudahan-kemudahan atau manfaat yang akan partai berikan kadangkala hanya berupa janji-janji yang tidak ditepati karena terbentur oleh kemampuan mereka setelah terpilih mendapatkan salah satu jabatan pemerintahan.

### **Proses Monitoring Partai Politik Terhadap Aspirasi Konstituennya**

Selain untuk mengetahui kecenderungan perilaku memilih konstituen dalam memberikan dukungan, beberapa partai politik bisa saja melakukan pemantauan untuk mengetahui apakah individu-individu tersebut mendukung mereka atau tidak pada

saat pemilihan. Sehingga kami melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa sukses partai politik dapat mempertahankan dukungan dari konstituennya melalui upaya-upaya seperti pengumpulan informasi tentang perilaku memilih konstituen, memanfaatkan figur partai, serta pemberian konsekuensi kepada yang tidak memilih mereka.

Cara-cara yang digunakan partai politik untuk mengetahui pilihan seseorang baik di Kabupaten Sumedang maupun di Kota Bandung pada dasarnya sama saja, dari hasil wawancara dapat diidentifikasi beberapa kegiatan yang partai-partai lakukan antara lain melakukan monitoring diluar TPS, menggunakan kelompok penggerak pemilih, menempatkan kadernya /Satgas di TPS atau Saksi, melakukan identifikasi wilayah dan pemilih, menentukan metode kampanye, implementasi dan evaluasi strategi kampanye, serta menggunakan dan menggerakkan organisasi sayap. Melalui berbagai upaya yang dilakukan ini, partai politik mencoba berkompetisi dengan partai lainnya untuk memenangkan pemilihan umum dan lebih jauhnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup partai politik tersebut.

Akan tetapi partai-partai tidak akan mudah mempertahankan pilihan seseorang, karena para pemilih akan mendapatkan atau mencari sendiri berbagai informasi dari partai lain, walaupun konstituen tidak menepati janjinya untuk memilih partai tersebut kandidat atau partai tidak akan mudah untuk memberikan konsekuensi kepada konstituen tersebut, karena akan sulit untuk mengetahui siapa yang menepati janji atau tidak menepati janji untuk tetap mendukung partai tersebut. seringkali saking banyaknya partai politik peserta pemilu sehingga seorang konstituen didekati oleh banyak partai dan demi manfaat yang mereka dapatkan akhirnya mengatakan kepada semua partai bahwa mereka akan mendukung partai tersebut.

Perilaku memilih partai politik dalam mencari tahu pilihan konstituen lebih besar dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, karena sistem multipartai berakibat kandidat dan partai politik harus berkompetisi dengan banyak kandidat dari partai lain.

Penilaian responden terhadap monitoring partai terhadap perilaku memilih konstituen kurang begitu mempercayai partai-partai yang ada, akan tetapi ada beberapa partai yang mempercayai partai dalam hal ini.

### **Posisi Kebijakan yang Dimiliki Partai Politik**

Partai-partai politik di Kabupaten Sumedang maupun di Kota Bandung pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat seperti memberikan sumbangan sosial untuk orang miskin. Partai-partai juga sebagian besar mendukung peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, akan tetapi sebagian besar responden menyatakan peran negara tidak boleh terlalu besar dalam mengatur perekonomian sehingga mematikan potensi ekonomi rakyat.

**Relasi Partai Politik dan Konstituen di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang  
(Caroline Paskarina, Neneng Yani Yuningsih, Siti Witianti)**

---

Partai-partai mendukung perluasan layanan pemerintah atau perluasan manfaat pelayanan publik seperti pemberian dana pensiun, penyediaan fasilitas kesehatan yang representatif dan komprehensif, penyediaan sekolah dasar dan menengah gratis untuk semua orang.

Selain itu, partai juga sebagian partai mengatakan bahwa kebijakan partai harus berlandaskan keberagaman yang ada di daerah, sehingga tidak mengorbankan kaum minoritas. Selain itu, partai mendukung kebebasan individu secara penuh dari intervensi negara dalam masalah yang berkaitan dengan isu-isu agama, perkawinan, jenis kelamin, pekerjaan, kehidupan keluarga, dan tingkah laku sosial secara umum.

Di Kabupaten Sumedang partai ditempatkan di kiri spektrum politik dan nasional berdasarkan seluruh kebijakan dan kerangka kerja ideologi, sedangkan di Kota Bandung untuk Golkar, PKS dan Partai Gerindra ditempatkan sebagai partai yang berada di sebelah kiri spektrum politik dan nasional berdasarkan seluruh kebijakan dan kerangka kerja ideologi. Sedangkan dua partai lainnya yaitu PPP dan Partai Demokrat ditempatkan di sebelah kanan spektrum politik.

Penilaian responden terhadap posisi kebijakan di Kabupaten Sumedang Responden sangat percaya kepada PDI Perjuangan dan PPP berkaitan dengan posisi kebijakan. Sedangkan responden mengatakan tidak percaya kepada partai Golkar dan Partai Demokrat untuk posisi kebijakan ini. Penilaian responden di Kota Bandung responden menyatakan tidak percaya kepada Partai Demokrat, PKS, dan partai Gerindra, karena menurut responden saat ini jamannya oligarki parpol, ketika partai sudah mendapatkan apa yang diinginkannya yaitu kekuasaan dan jabatan maka seolah-olah lupa dengan janji-janjinya kepada konstituen semasa kampanye, selain itu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan partai semua partai politisi melakukan korupsi. Begitupula dengan partai-partai yang pada awal pembentukannya dipandang sebagai partai yang agamis dan bersih sekarang ikut-ikutan menjadi partai yang korup.

**Strategi Kompetisi Partai Politik Untuk Memobilisasi Dukungan Konstituen**

Sistem pemilihan umum yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini menyebabkan partai-partai baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal memiliki strategi untuk berkompetisi dalam memobilisasi massa. Karena walau bagaimanapun kemenangan akan diraih jika mendapatkan dukungan masa sebesar-besarnya. Untuk itu tidak jarang partai politik melakukan mobilisasi massa dengan berbagai cara, apakah itu dengan menonjolkan figur yang kharismatik, dengan menekankan daya tarik pada isu-isu kebijakan, melalui peningkatan kapasitas partai dalam memberikan manfaat kepada pemilih, menampilkan daya tarik partai, ataupun dengan cara memperlihatkan kapasitas partai dalam menjaga stabilitas, politik, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian faktor figur memang dianggap paling sering digunakan partai sebagai strategi memenangkan pemilihan umum, selain itu partai-partai di Kota Bandung mulai memfokuskan kepada orientasi isu, selain itu partai politik juga mencoba turun ke daerah-daerah untuk memobilisasi massa dengan menyebarkan platform dan program-program kerja mereka. Hampir semua partai politik memberikan sumbangan berupa materi kepada konstituennya agar mau mendukung mereka, akan tetapi tidak terlalu kuat. Pemberian materi kepada konstituen hanya dapat dilakukan oleh partai yang memiliki kekuatan finansial, sehingga wajar jika pendapat responden mengarah pada Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Partai-partai cukup kuat dalam melakukan upaya menarik dukungan pemilih untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini, biasanya dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup partai tersebut, agar pada pemilihan umum yang akan datang dapat kembali meraih kursi di dewan atau menjabat menjadi kepala pemerintahan atau kepala daerah, untuk itu partai politik sangat membutuhkan dukungan konstituen secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang.

Partai-partai tidak terlalu kuat dalam menggunakan strategi yang memobilisasi massa dengan memelihara stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Hal ini kemungkinan karena selama ini partai politik tidak pernah mampu untuk mencegah terjadi kerusuhan, demonstrasi, dan ketidakteraturan di Kota Bandung.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan organisasi partai politik di level lokal masih bersifat hierarkis. Mekanisme pertukaran yang berlangsung antara partai politik dengan konstituen lebih bersifat transaksional.

Proses monitoring yang dilakukan partai politik terhadap aspirasi konstituennya tidak terlalu ketat. Dilihat dari posisi kebijakan partai politik, partai-partai pada umumnya mendukung kebijakan negara yang mengatur kesejahteraan masyarakat, partai-partai saat ini dalam perjuangannya lebih pragmatis, pertarungan politik lebih bersifat non ideologis.

Strategi kompetisi yang digunakan partai politik untuk memobilisasi dukungan konstituen di Kabupaten Sumedang masih mengandalkan figur atau sosok kharismatik. Kami merekomendasikan beberapa hal agar relasi antara partai dengan konstituennya lebih demokratis

Pertama, Partai harus dibenahi sehingga menjadi partai yang lebih demokratis dengan ciri; tidak terlalu mengintervensi partai di tingkat lokal, meningkatkan sumber daya di tingkat lokal baik sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial, misalnya dengan cara mengaktifkan kembali sumbangan dari anggota. Selain itu partai

**Relasi Partai Politik dan Konstituen di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang  
(Caroline Paskarina, Neneng Yani Yuningsih, Siti Witianti)**

---

harus melibatkan anggota dalam pencalonan, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, Mekanisme pertukaran partai lebih *isu oriented*, dan menghilangkan praktik-praktik money politik. Perlu ada payung hukum yang mengatur mekanisme pemilu yang jelas dan mudah dijalankan. Partai politik harus mendukung program-program pemerintah yang pro rakyat, mempertimbangkan keragaman budaya di daerah, dan mendukung pengurangan peran negara dalam pengaturan ekonomi rakyat, partai harus lebih ideologis, dan tidak terlalu pragmatis untuk mengejar kekuasaan belaka.

Terakhir, Strategi kompetisi antar partai dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan menggunakan konsep marketing politik, sehingga dapat menentukan sasaran dengan tepat, dan melakukan pendekatan yang tepat untuk mendapatkan dukungan dari sasaran yang sudah ditargetkan di awal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amal, Ichlasul (ed.). 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Clark, Alistair. 2003. "Parties and Political Linkage: Toward a Comprehensive Framework for Analysis". *Makalah*, disampaikan pada PSA Annual Conference, University of Leicester, 15-17 April.
- Firamanzah, 2010, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi* (edisi revisi), PT Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kitschelt, Herbert dan Steven I. Wilkinson (eds.). 2007. *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- La Palombara, Joseph dan Myron Weiner. 1966. *Political Parties and Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Nawaz, Farzana. 2008. "Corruption and Resource Distribution in Neopatrimonial Systems". Diunduh dari [www.U4.no](http://www.U4.no). pada 31 Mei 2010.

- Nursal, Adnan. 2004. *Political Marketing: Strategi memenangkan pemilu (Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden)*. PT Gramedia, Jakarta
- Romli, Lili, dkk. 2003. *Potret Partai Politik Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (eds.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Surbakti, Ramlan. 1998. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Thaha, Idris (ed.). 2004. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.